UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Rekonstruksi Penyusunan Program Legislasi Nasional Prioritas dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia
Azmi Fathu Rohman, Dr. Mahaarum Kusuma Pertiwi, S.H., M.A., M.Phil
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL viii
INTISARI ix
ABSTRACT x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 12
C. Tujuan Penelitian 12
D. Manfaat Penelitian 13
E. Keaslian Penelitian 14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 17
A. Program Legislasi Nasional 17
1. Konsep Program Legislasi Nasional 17
2. Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional 18
B. Pembentukan Undang-Undang 33
1. Pentingnya Prosedur dalam Pembentukan Undang-Undang 33
2. Pembentukan Undang-Undang Yang Baik 35
C. Teori *Legisprudence* 40
D. *Meaningful Participation* dalam Pembentukan Undang-Undang 45
1. Konsep Dasar *Meaningful Participation* 45
2. Perkembangan *Meaningful Participation* dalam Demokrasi Modern 50
3. *Meaningful Participation* dalam Pembentukan Undang-Undang 52
4. Transformasi Menuju *Digital Meaningful Participation* 55

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Rekonstruksi Penyusunan Program Legislasi Nasional Prioritas dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia
Azmi Fathu Rohman, Dr. Mahaarum Kusuma Pertiwi, S.H., M.A., M.Phil
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

BAB III METODE PENELITIAN 60
A. Jenis dan Sifat Penelitian 60
B. Cara dan Alat Pengumpulan Data 62
C. Jalannya Penelitian 65
D. Analisis Hasil 65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 67
A. Problematika Pengaturan dan Praktik Penyusunan Program Legislasi Nasional Prioritas 67
1. Penyusunan Program Legislasi Nasional Prioritas : Studi Kasus Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 67
2. Analisis Problematika Pengaturan dan Praktik Penyusunan Program Legislasi Nasional Prioritas 106
B. Rekonstruksi Penyusunan Program Legislasi Nasional Prioritas Untuk Mewujudkan Pembentukan Undang-Undang Yang Baik 119
1. Rekonstruksi Penyusunan Program Legislasi Nasional Prioritas Berbasis Pemantauan dan Peninjauan Legislasi 119
2. Rekonstruksi Keterkaitan *Meaningful Participation* dalam Perencanaan Prolegnas Prioritas 155
BAB V PENUTUP 175
A. Kesimpulan 175
B. Saran 177
DAFTAR PUSTAKA 179

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Rekonstruksi Penyusunan Program Legislasi Nasional Prioritas dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia
Azmi Fathu Rohman, Dr. Mahaarum Kusuma Pertiwi, S.H., M.A., M.Phil
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Jumlah RUU dalam Prolegnas Prioritas dan RUU Yang Telah Selesai pada Periode 2020-2024 8

Tabel 2. Standar Pembentukan Hukum Nasional dan Global 36

Tabel 3. Distribusi Pengusul RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2020.....69

Tabel 4. Kerangka Regulasi RPJMN yang masuk dalam Prolegnas Tahun 2020.....75

Tabel 5. Distribusi Pengusul RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2021 78

Tabel 6. Distribusi Perubahan Pengusul RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2021 83

Tabel 7. Kerangka Regulasi RPJMN yang masuk dalam Prolegnas Tahun 2021.....86

Tabel 8. Distribusi Pengusul Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022.....87

Tabel 9. Distribusi Pengusul Prolegnas RUU Perubahan Prioritas Tahun 2022.....87

Tabel 10. Implementasi Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan UU Prolegnas Prioritas Tahun 2022.....92

Tabel 11. Kerangka Regulasi RPJMN yang masuk dalam Prolegnas Tahun 2022...93

Tabel 12. Distribusi Pengusul Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023.....95

Tabel 13. Distribusi Pengusul Prolegnas RUU Perubahan Prioritas Tahun 2023.....96

Tabel 14. Distribusi Pengusul Prolegnas RUU Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 96

Tabel 15. Kerangka Regulasi RPJMN yang masuk dalam Prolegnas Tahun 2023....98

Tabel 16. Rekapitulasi Status Tahapan RUU Prolegnas Prioritas 2023 99

Tabel 17. Kerangka Regulasi RPJMN yang masuk dalam Prolegnas Tahun 2024 103

Tabel 18. Tanggal Penetapan Prolegnas Prioritas Tahunan Sejak Tahun 2020-2024 ...106

Tabel 19. Parameter Rekonstruksi Penentuan Skala Prioritas Program Legislasi Nasional 140